

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran penting penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari sisi salah satu tujuan penting di dalam mendirikan sebuah perusahaan yang selain untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, juga untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan.

Melalui laba yang diperoleh tersebut, perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Namun dalam mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hambatan yang akan dihadapi perusahaan, dimana hambatan tersebut pada umumnya bersifat fundamental. Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain:

- a. Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran, dan produksi).

- b. Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dan pemegang saham.
- c. Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan efisien serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik (*Good Corporate Governance*), yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka yakin terhadap perolehan keuntungan dari investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Selain itu juga dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Dari sinilah, nampak bahwa penerapan GCG sangatlah penting bagi perusahaan.

Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu hal yang penting, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia (Sulistyanto,2003). Hal ini kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional

Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999. Melalui penerapan *Good Corporate Governance* tersebut diharapkan :

- a. Perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- b. Perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *coporate value*.
- c. Mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *deviden*.

Meskipun pentingnya penerapan GCG sudah sangat jelas, sebagaimana dijelaskan di atas, namun penerapan yang konkret di kalangan pelaku usaha di Indonesia masih tergolong minim. Bukti empiris yang diperoleh dari hasil riset Zhuang, dkk pada tahun 2000, menunjukkan masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam mengelola perusahaan dibanding negara-negara Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar-standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Dalam Bisnis Indonesia, 2005 dipaparkan beberapa hasil survey yang menunjukkan hal senada, antara lain: survey yang dilakukan Mc Kinsey & Co. terhadap 250 investor global dari tiga benua yaitu AS, Eropa, dan Asia, pada pertengahan tahun 2000, diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia berada pada peringkat terendah, survey CLSA (*Credit*

Lyonnais Securities Asia) diakhir tahun 2004 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-10 atau terburuk di Asia Tenggara atas pelaksanaan GCG, dan *survey Standard & Poors* juga menyatakan pelaksanaan GCG di Indonesia secara umum stagnan.

Para pelaku usaha menilai GCG hanya sebatas kepatuhan terhadap peraturan yang kurang memberikan dampak langsung terhadap kinerja keuangan seperti halnya dalam kegiatan pemasaran. Sehingga ini menjadi alasan mengapa GCG kurang maksimal dalam hal implementasinya di kalangan perusahaan-perusahaan Indonesia. Suatu hal yang sangat kontradiktif, dimana di satu sisi penerapan GCG diyakini sangatlah penting dalam pencapaian tujuan perusahaan yang berkelanjutan, namun di sisi lain, banyak pelaku usaha yang enggan menerapkannya secara sungguh-sungguh dengan alasan dampak yang ditimbulkan kurang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kontradiksi tersebut menjadi salah satu latar belakang ditelitinya pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini, faktor eksogenitas yang dipengaruhi oleh penerapan *Good Corporate Governance* yaitu *Price Book Value (PBV)* sebagai variabel terikat yang berfungsi untuk mengontrol indikator variabel kinerja keuangan.

Selanjutnya, yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan itu sendiri oleh perusahaan telah lama menjadi perhatian bagi setiap pelaku usaha. Dari sekian banyak alat analisis yang ada, terdapat satu persamaan yaitu

penggunaan data akuntansi sebagai input pengukuran, dimana hal ini kemudian menjadi kelemahan yang melekat pada tiap-tiap analisis tersebut (Budiman,2004). Kemudian lahirlah PBV yang pertama kali diperkenalkan oleh Stern dan Steward. PBV berbeda dengan pendekatan berbasis rasio tingkat kembalian tradisional seperti ROI, ROA, atau ROE. Model PBV berasal dari konsep biaya modal (*cost of capital*), yaitu resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan investasi. Dalam penelitiannya, Budiman (2004), mengungkapkan bahwa penerapan PBV sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan sangat sesuai dan mendukung prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Good Corporate Governance* (GCG).

Kunci utama penerapan GCG adalah adanya transparansi, keterbukaan informasi, dan keterlibatan semua unsur dalam perusahaan termasuk *stakeholders* dalam suatu bentuk kerjasama yang baik telah menjadikan PBV sebagai indikator kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pintu gerbang dalam mewujudkan terlaksananya GCG di Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan perusahaan perbankan sebagai subyek penelitian karena perbankan sebagai lembaga pengelola keuangan yang bekerja atas dasar kepercayaan masyarakat, maka harus mampu menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, sehingga mampu mengoptimalkan rasa kepercayaan di mata masyarakat. Periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu selama 5 (lima) tahun

periode 2009-2013, hal ini dikarenakan supaya data yang didapatkan lebih banyak, sehingga hasil penelitian mempunyai daya komparabilitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* yang diindikasikan dengan Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi Independen, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan PBV sebagai indikator dari kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang tertuang dalam judul **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : “

1. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013?
2. Apakah Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013?

3. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Akademis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi secara umum, khususnya pada bidang ilmu akuntansi keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan perusahaan.
2. Bagi Pihak Perusahaan/Manajemen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dalam laporan keuangan yang disajikan.
3. Bagi masyarakat. Memberikan stimulus sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh.